

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PSAK 72 TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero)

Teltin Amelia Latupeirissa, Pieter Leunupun, Nicoline Hiariej
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia Maluku

ABSTRACT

This study aims to determine how the impact of the application of PSAK 72 on the financial performance of PT. PLN (Persero). This research was conducted at PLN (Persero) because it was considered as one of the companies that was significantly affected by the enactment of PSAK 72. This research analysis uses descriptive quantitative methods, with primary data and quantitative research documents on PT. PLN (Persero) in 2020 financial statements downloaded from the official PT. PLN (Persero) website. The study was calculated using financial ratios including: current ratio, total asset turnover, debt ratio, return on equity, and price per earning and tested using industry standards. The results showed that the situation was not good when the application of PSAK 72 was applied to PT. PLN (Persero). seen from the calculation results that current ratio, total asset turnover, debt ratio and return on equity of PT. PLN (Persero) financial performance in 2020 is considered not good and only price per earning is considered good if tested using industry standards by kasmir (2017).

Keywords: PSAK 72, Financial Performance, Industry Standard

PENDAHULUAN

Standar akuntansi keuangan adalah standar akuntansi yang mengatur tentang pembuatan, penyusunan, hingga proses pencatatan dan penyajian data-data akuntansi. Tujuannya agar semua bentuk laporan keuangan menjadi seragam dan mudah dipahami oleh siapa saja.

Berbagai lembaga dan institut resmi dalam negeri telah menyetujui dan mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS), Melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dalam rapatnya pada tanggal 23 November 2016 telah mengesahkan *Exposure Draft* (ED) diantaranya; PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 32 tentang Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan, dan Amandemen terhadap PSAK 62 tentang Kontrak Asuransi - Menerapkan ED PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan dengan PSAK 62 tentang Kontrak Asuransi.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) Telah menerbitkan dan menetapkan tiga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru pada Tahun 2017, yang pertama yaitu PSAK 71 memberi panduan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Standar yang mengacu kepada *International Financial Reporting Standard (IFRS) 9* ini akan menggantikan PSAK 55 yang sebelumnya berlaku. Selain soal klasifikasi aset keuangan, salah satu poin penting PSAK 71 adalah soal pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang berupa piutang, pinjaman, atau kredit. Standar baru ini mengubah secara mendasar metode penghitungan dan penyediaan cadangan untuk kerugian akibat pinjaman yang tak tertagih. Jika berdasarkan PSAK 55, kewajiban pencadangan baru muncul setelah terjadi peristiwa yang mengakibatkan risiko gagal bayar (*incurred loss*), PSAK 71 memandatkan korporasi menyediakan pencadangan sejak awal periode kredit. Kini, dasar pencadangan adalah ekspektasi kerugian kredit (*expected credit loss*) di masa mendatang berdasarkan berbagai faktor; termasuk di dalamnya proyeksi ekonomi di masa mendatang. Berdasarkan standar akuntansi baru ini, artinya, korporasi harus menyediakan cadangan kerugian atas penurunan nilai kredit (CKPN) untuk semua kategori kredit atau pinjaman, baik itu yang berstatus lancar (*performing*), ragu-ragu (*underperforming*), maupun macet (*non-performing*). Untuk kredit lancar, misalnya, korporasi harus menyediakan CKPN berdasarkan ekspektasi kerugian kredit dalam 12 bulan mendatang.

Yang kedua yaitu PSAK 72 tentang Pengakuan Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan merupakan adopsi IFRS 15 yang telah berlaku di Eropa sejak Januari 2018. PSAK 72 merupakan PSAK sapu jagat karena mengganti banyak standar sebelumnya. Beberapa standar yang dicabut dengan terbitnya PSAK 72 adalah PSAK 34 tentang Kontrak Konstruksi, PSAK 23 tentang Pendapatan, ISAK 10 tentang Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 21 tentang Perjanjian Konstruksi Real Estate, ISAK 27 tentang Pengalihan Aset dari Pelanggan, serta PSAK 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate.. Esensinya, PSAK 72 mengubah cara pengakuan pendapatan kontrak yang tadinya rigid (*rule based*) menjadi berbasis prinsip (*principle based*). Pengakuan pendapatan kontrak, misalnya, sekarang tidak berdasarkan besaran uang muka yang sudah diterima. Berdasarkan standar baru ini, pengakuan pendapatan bisa dilakukan secara bertahap sepanjang umur kontrak (*over the time*) atau pada titik tertentu (*at a point of time*). Namun, pengakuan pendapatan bertahap tidak bisa diterapkan kepada sembarang kontrak. Ada syarat-syarat terkait konsumsi manfaat oleh pelanggan, peningkatan nilai aset di sisi pelanggan, serta kesepakatan tahap pembayaran kontrak. Jika suatu kontrak tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, pendapatan kontrak itu baru bisa diakui saat terjadi penyerahan aset (*at a point of time*).

Yang ketiga PSAK 73 yang merupakan adopsi dari IFRS 16 mengatur tentang sewa. PSAK ini akan menggantikan beberapa standar; diantaranya PSAK 30 tentang Sewa, ISAK 23 tentang Sewa Operasi, dan ISAK 25 tentang Hak atas Tanah. Standar baru ini akan mengubah secara substansial pembukuan transaksi sewa dari sisi penyewa (*lessee*). Ringkasnya, berdasarkan PSAK 73, korporasi penyewa mesti membukukan hampir semua transaksi sewanya sebagai sewa finansial (*financial lease*). Pembukuan sewa operasi (*operating lease*) hanya boleh dilakukan atas transaksi sewa yang memenuhi dua syarat: berjangka pendek (di bawah 12 bulan) dan bernilai rendah. Yang masuk kategori ini misalnya sewa ponsel, laptop, dan sejenisnya. Konsekuensi sewa finansial cukup panjang. Yang paling mendasar, kini, perusahaan harus mencatatkan aset (sewa) dan kewajiban (sewa) di dalam neraca. Jadi, transaksi sewa yang tadinya bisa *off balance sheet* sekarang menjadi *on balance sheet*, pencatatan ini bisa mempengaruhi rasio utang, rasio pengembalian aset, dan masih banyak lagi.

PSAK 72 yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 26 Juli 2017 tentang Pengakuan Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan yang merupakan adopsi dari IFRS 15 *Revenue from Contracts with Customers* telah berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Untuk dapat menentukan pengakuan pendapatan, Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk melakukan analisis transaksi berdasarkan kontrak terlebih dahulu, yang terdiri dari 5 (lima) tahapan, tahap pertama yaitu Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, tahap kedua mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, tahap ketiga menentukan harga transaksi, tahap keempat mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, dan tahap kelima yaitu Mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.

PSAK 72 menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 telah menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan yaitu: PSAK 23 tentang Pendapatan, PSAK 34 tentang Kontrak Konstruksi, ISAK 10 tentang Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 21 tentang Perjanjian Konstruksi Real Estat, ISAK 27 tentang Pengalihan Aset Dari Pelanggan, dan PSAK 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan *Real Estate*. Tujuan PSAK 72 (2017) adalah untuk menetapkan prinsip bagi emiten yang menerapkannya sehingga dalam pelaporan informasinya akan berguna bagi para pengguna laporan keuangan terhadap yang ditimbulkan atas kontrak dengan pelanggan dari sisi sifat, waktu, jumlah, serta ketidakpastian pendapatan dan arus kas, (Hayati, 2020).

Banyak sektor yang terkena efek dari pemberlakuan standar ini, seperti sektor industri konstruksi, telekomunikasi, perbankan, retail, manufaktur dan BUMN di

Indonesia. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN, Gatot Trihargo menilai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71, 72 dan 73 akan berdampak pada rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (www.Kompas.com).

PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kelistrikan yang melayani masyarakat di seluruh Nusantara, bertekad untuk memberikan pelayanan jasa ketenagalistikan yang terbaik dan memenuhi standar ketenagalistikan yang dapat diterima dunia internasional dan mewujudkan hal itu dengan bertumpu pada kapasitas seluruh warganya. Dalam menjalankan bisnisnya, PLN bertekad bekerja dengan semangat untuk selalu menghasilkan produk dan pelayanan yang terbaik serta memperlakukan pelanggan, mitra usaha, dan pemasok dengan adil tanpa membedakankannya. Perusahaan menerapkan PSAK 72 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2020, yang berdampak pada perubahan atas kebijakan akuntansi dan adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap jumlah yang telah diakui pada laporan keuangan. Berikut ini adalah Ikhtisar Keuangan PT. PLN Tahun 2017-2019 sebelum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 72.

Tabel 1
Ikhtisar Keuangan PT. PLN Tahun 2018-2020

(Rp miliar)	2018	2019	2020	(Rp billion)
IKHTISAR POSISI KEUANGAN				SUMMARY OF FINANCIAL POSITION
Aset tidak lancar	1.379.072	1.433.688	1.491.906	Non-Current Assets
Aset lancar	113.415	151.367	97.153	Current Assets
JUMLAH ASET	1.492.488	1.585.055	1.589.060	TOTAL ASSETS
Liabilitas jangka panjang	407.178	496.376	499.588	Long Term Liabilities
Liabilitas jangka pendek	157.896	159.298	149.659	Short Term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	565.074	655.675	649.247	TOTAL LIABILITIES
JUMLAH EKUITAS	927.414	929.380	939.813	TOTAL EQUITY
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	8.726	10.301	14.112	Investments in Associates and Joint Ventures
IKHTISAR LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN	2018	2019	2020	OVERVIEW OF INCOME STATEMENT & COMPREHENSIVE INCOME
PENDAPATAN USAHA	344.173	359.606	345.416	REVENUES
Penjualan Tenaga Listrik	263.478	276.062	274.898	Sales of Electricity
Penyambungan Pelanggan	7.309	6.935	313	Customer Connection Fees
Subsidi Pemerintah	48.102	51.712	47.988	Government Subsidy
Pendapatan Kompensasi	23.173	22.254	17.904	Compensation Income
Lain-lain	2.111	2.644	4.312	Others
BEBAN USAHA	308.189	315.441	301.008	OPERATING EXPENSES
Bahan bakar dan pelumas	137.267	136.084	106.014	Fuel and Lubricants
Pembelian tenaga listrik	84.268	83.564	98.652	Purchased Electricity
Sewa	4.272	3.617	3.101	Lease
Pemeliharaan	20.738	22.328	21.940	Maintenance
Kepegawaian	22.950	25.909	24.966	Personnel
Penyusutan aset tetap	30.745	35.318	36.663	Property, plant and equipment depreciation
Penyusutan aset hak-guna	-	-	2.480	Right-of-use assets depreciation
Lain-lain	7.950	8.620	7.192	Others
LABA (RUGI) USAHA	35.984	44.165	44.407	OPERATING PROFIT (LOSS)
LABA SEBELUM PAJAK	19.901	26.119	12.291	INCOME (LOSS) BEFORE TAX
Beban Pajak	(8.325)	(21.797)	(6.298)	Tax Expenses
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	11.576	4.322	5.993	INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
Labar tahun berjalan diatribusikan kepada:	2018	2019	2020	Income for the Year Attributable to:
Pemilik entitas induk	11.568	4.271	5.950	Owners of the Parent
Kepentingan non pengendali	7	51	42	Non-Controlling Interest
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	58.963	27	6.302	TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME FOR THE YEAR
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:	2018	2019	2020	Total comprehensive (expense) income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	58.955	(25)	6.259	Owner of the parent
Kepentingan non pengendali	7	51	42	Non-controlling interest
LABA PER SAHAM DASAR (dalam rupiah penuh)	105.332	37.516	48.439	BASIC EARNINGS PER SHARE (in full Rupiah)

Sumber: Laporan Tahunan 2020 Annual Report PT.PLN (Persero).

Berdasarkan Data Ikhtisar Keuangan PT. PLN pada Tabel di atas, lonjakan laba bersih PLN di kala pandemi Covid-19 pada 2020 ini dikarenakan berkat adanya efisiensi di sisi teknis dan operasional, serta inovasi melalui program transformasi PLN yang dijalankan sejak April 2020.

Laba bersih PLN tahun 2020 tersebut dapat bertambah sebesar Rp.13,6 triliun apabila tidak mempertimbangkan pencatatan *unrealised loss* selisih kurs sebesar Rp.7,7 triliun, serta tambahan pengakuan pendapatan dari penyambungan pelanggan sebesar Rp.5,9 triliun jika pencatatannya dilakukan sama seperti tahun 2019 yang belum menerapkan PSAK 72.

PLN berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp.345,4 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan penjualan tenaga listrik mencapai Rp.274,9 triliun, termasuk di dalamnya subsidi stimulus Covid-19 sebesar Rp.13,8 triliun membantu 33 juta pelanggan. Selain itu, juga terdapat pendapatan subsidi sebesar Rp.48,0 triliun yang menjangkau 37 juta pelanggan dan kompensasi Rp.17,9 triliun untuk 42 juta pelanggan.

Pencapaian ini merupakan hasil dari transformasi PLN, yang berfokus pada peningkatan pendapatan dan menurunkan biaya pokok penyediaan, serta peningkatan layanan. Korporasi beralih dari strategi supply driven ke demand driven, inovasi-inovasi menciptakan kebutuhan dari pelanggan baru dan existing, dan digitalisasi untuk menekan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Listrik.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan dan pelayanan kepada pelanggan, PLN juga mengembangkan lini usaha di luar kelistrikan dan melakukan optimalisasi aset PLN antara lain membangun layanan internet dan infrastruktur kendaraan listrik.

Dengan seluruh langkah efisiensi dan penghematan sepanjang tahun 2020, maka PLN mampu menurunkan beban usaha dengan cukup signifikan. Dari yang semula beban usaha sebesar Rp.315,4 triliun di tahun 2019, menjadi hanya sebesar Rp 301,0 triliun di tahun 2020. Artinya, ada pengurangan sebesar Rp.14,4 Triliun pada beban usahanya.

Pendapatan merupakan indikator untuk pembentukan laba, diukur secara wajar sesuai prinsip pengakuan pendapatan untuk diterapkan guna mengukur pendapatan yang diterima sebenarnya oleh perusahaan, akan diperbandingkan dalam laporan keuangan serta disajikan sesuai SAK. Masalah utama pendapatan yaitu bagaimana menentukan saat pengakuan pendapatan, jika penerapan sesuai transaksi serta sesuai PSAK 72, maka pendapatan yang diterapkan dapat dikatakan wajar. Selain pendapatan, beban juga merupakan faktor yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan dan diakui dalam laporan laba rugi berkaitan dengan manfaat ekonomi dengan penurunan aset dan diukur dengan dengan penurunan aset dan diukur dengan handal. Ketepatan pencatatan beban tergantung pada ketepatan pengklasifikasian beban yang diterapkan perusahaan karena

pihak yang terlibat membutuhkan berbagai informasi untuk kepentingannya baik informasi keuangan maupun non keuangan.

Perusahaan mengakui pendapatan saat pendapatan tersebut telah direalisasikan pada saat atau telah diterima atau didapatkan. Akun terpenting dalam laporan keuangan yaitu pendapatan dikarenakan akun ini memberikan informasi dan menilai kinerja suatu perusahaan selain itu menjadi daya Tarik untuk para investor yang dijual ke publik dengan melewati saham yang dijual perusahaan. pendapatan diakui dengan seharusnya saat pendapatan sangat besar maupun kecil akan menyebabkan data dalam laporan laba rugi untuk pengambilan keputusan bagi pihak manajemen. Kinerja keuangan memperlihatkan keadaan perusahaan dan pencapaian suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Untuk melihat kinerja keuangan disuatu entitas melalui analisa laporan keuangan. Menganalisis laporan keuangan dengan melihat rasio keuangan, diantara banyak rasio keuangan untuk memperhitungkan kinerja keuangan yaitu rasio profitabilitas dikarenakan untuk menggambarkan keefektifan dan efisiensi dari kegiatan operasional perusahaan pada pengelolaan modal dan aset yang menimbulkan laba untuk entitas.

Masalahnya adalah apakah penerapan akuntansi pada pengakuan dan pengukuran pendapatan oleh PT. PLN sudah tepat dan telah sesuai dengan PSAK 72. Hal ini menjadi sangat penting karena pada kenyataannya jika pengakuan pendapatan tidak tepat maka dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan salah penyajian yang dikhawatirkan dapat menyebabkan para pengguna informasi keuangan salah dalam mengambil keputusan.

Penelitian terdahulu mengenai dampak penerapan PSAK 72 pada beberapa industri tersebut telah dilakukan, diantaranya (Duwi Rahayu, 2020) dan (Veronica dkk, 2019), menyatakan bahwa penerapan PSAK 72 membuat kinerja keuangan pada perusahaan telekomunikasi dan real estate terlihat tidak terlalu baik jika dilakukan perbandingan dengan menggunakan standar yang sebelumnya. (Casnila dkk, 2020) menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya terdapat perbedaan dampak perubahan penilaian kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). (Puspamurti dan Firmansyah, 2020) juga menyatakan untuk mengimplementasikan PSAK 72 di tahun 2020 sebaiknya melakukan persiapan seperti yang dilakukan oleh PT Telkom minimal 1 tahun sebelum PSAK ini mulai efektif berlaku.

Pemberlakuan ketiga PSAK yang berlaku efektif pada 1 Januari 2020 dengan opsi penerapan dini diperkenankan, salah satunya adalah PSAK 72 yang mengatur tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan membuat sejumlah industri terpengaruh dengan PSAK 72 pada tingkat signifikansi yang berbeda-beda. Pendapatan adalah akun terpenting dalam laporan keuangan karena akun ini memberikan informasi

dan menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Salah satu industri yang terpengaruh dengan PSAK 72 yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang akan diteliti bagaimana dampak penerapan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan terhadap kinerja keuangan industri tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dampak penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)

TINJAUAN PUSTAKA

Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72

Entitas mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika (atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset. (ED PSAK 72, 2016:10 Par.31)

Untuk dapat menentukan pengakuan pendapatan, menurut (ED PSAK 72, 2016:3 Par.09), pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk melakukan analisa transaksi berdasarkan kontrak terlebih dahulu, yang terdiri dari 5 (lima) tahapan berikut:

Mengidentifikasi Kontrak Dengan Pelanggan.

Suatu entitas dapat mengakui kontrak dengan pelanggan jika memenuhi persyaratan berikut:

- a) Semua pihak sepakat atas suatu kontrak dan memegang komitmen masing-masing untuk memenuhi kewajibannya sesuai yang tercantum dalam kontrak tersebut.
- b) Suatu entitas dapat melakukan identifikasi hak atas barang atau jasa yang akan dialihkan.
- c) Suatu entitas dapat melakukan dentifikasi atas jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan.
- d) Suatu kontrak memiliki substansi komersial dalam hal risiko yang mungkin terjadi, waktu pelaksanaan kontrak atau perkiraan jumlah arus kas di masa yang akan datang.
- e) Suatu entitas dapat menagih imbalan yang berhak diterimanya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan.

Kombinasi Kontrak

Kombinasi kontrak menjelaskan tentang kombinasi yang dapat dilakukan dari dua atau lebih kontrak yang disepakati sesuai jangka waktunya. Kombinasi kontrak tersebut dapat menjadi tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi:

- a) Kontrak yang dinegosiasikan merupakan kontrak dengan tujuan komersial tunggal dalam satu aket tertentu.
- b) Jumlah imbalan yang dibayarkan oleh satu pihak berdasarkan pada harga pelaksanaan dari kontrak lain.
- c) Barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak merupakan kewajiban pelaksanaan.

Modifikasi Kontrak

Modifikasi kontrak menjelaskan tentang perubahan kontrak yang mungkin terjadi dilakukan meliputi ruang lingkup atau harga kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak di kemudian hari. Entitas mencatat sebagai kontrak terpisah jika kondisi berikut terpenuhi:

- a) Ruang lingkup kontrak mengalami peningkatan dikarenakan adanya penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan (*distinct*).
- b) Harga kontrak mengalami peningkatan jika terjadi penyesuaian harga jual dari barang atau jasa yang semula disepakati dan harga jual tersebut berdiri sendiri yang mencerminkan harga pada suatu kontrak tertentu.

Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan

Pada bagian ini suatu entitas menilai barang atau jasa yang tercantum dalam kontrak dengan pelanggan dan mengakui suatu kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan baik:

- a) Suatu barang atau jasa yang ada dalam kontrak dapat diidentifikasi dan dapat dibedakan.
- b) Barang atau jasa yang dapat dibedakan secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan.

Penyelesaian Kewajiban Pelaksanaan

Pada bagian ini entitas mengakui adanya pendapatan jika entitas tersebut telah melaksanakan kewajibannya baik berupa pengiriman barang atau penyelesaian jasa kepada pelanggan. Suatu aset dialihkan kepada pelanggan ketika aset tersebut sudah diterima dengan ketentauan sebagai berikut:

- a) Kewajiban Pelaksanaan yang Diselesaikan Sepanjang Waktu atau *Performance Obligation Over Time* dimana suatu entitas mengalihkan asetnya setelah kewajibannya kepada pelanggan terpenuhi.
- b) Kewajiban Pelaksanaan yang Diselesaikan Pada Waktu Tertentu atau *Performance Obligation at a Point In Time* menjelaskan jika suatu entitas tidak mampu menyelesaikan kewajibannya maka entitas tersebut harus melaksanakan kewajiban yang sama pada periode waktu tertentu yang disepakati lebih lanjut dengan

mempertimbangkan persyaratan pengendalian atas kewajiban suatu entitas tersebut mencakup:

- 1) Entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset.
 - 2) Pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas aset.
 - 3) Entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset.
 - 4) Pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset.
 - 5) Pelanggan telah menerima aset.
- c) Pengukuran Kemajuan Terhadap Penyelesaian Kewajiban Pelaksanaan Secara Penuh untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu, entitas mengakui pendapatan sepanjang waktu dengan mengukur kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh. Tujuan ketika mengukur kemajuan adalah untuk menggambarkan kinerja entitas dalam mengalihkan pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu penyelesaian dari kewajiban pelaksanaan entitas).
- Entitas menerapkan metode tunggal atas pengukuran kemajuan untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu dan entitas menerapkan metode tersebut secara konsisten terhadap kewajiban pelaksanaan serupa dan dalam keadaan serupa. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas mengukur kembali kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh yang diselesaikan sepanjang waktu.

Kinerja Keuangan

Istilah kinerja atau *performance* seringkali dikaitkan dengan kondisi keuangan perusahaan. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumberdaya. Selain itu tujuan pokok penelitian kinerja adalah untuk memotivasi para karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar mematuhi tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012)

Menurut (Munawir, 2010:64) pengertian kinerja keuangan adalah Prestasi kerja yang telah diperoleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dan terutang dalam laporan keuangan yang bersangkutan.

Dari definisi kinerja keuangan diatas, dapat diambil kesimpulan sederhana bahwa kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan.

Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Salah satunya ialah dengan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan metode yang umum dilakukan untuk mengukur kinerja perusahaan di bidang keuangan. Rasio keuangan merupakan alat yang digunakan untuk membandingkan seberapa besar tingkat kinerja keuangan perusahaan. Pada dasarnya perhitungan rasio-rasio keuangan adalah untuk menilai kinerja keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan. Menurut (Harahap, 2015:297) rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat kuantitatif karena penelitian ini berkaitan dengan objek penelitian yaitu pada perusahaan dengan kurun waktu tertentu dengan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan perusahaan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Objek penelitian yaitu PT PLN (Persero), rancangan penelitian ini berbentuk penelitian data primer dengan riset dokumen kuantitatif yaitu data laporan keuangan PT. PLN (Persero) tahun 2020 yang di dapat langsung dari website resmi PT. PLN (Persero) (www.pln.co.id). Penelitian ini tanpa hipotesis karena peneliti memang atau belum dapat menentukan dugaan jawaban terhadap hasil penelitian ini. Populasi yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT PLN (Persero) tahun 2020 dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik total sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara keseluruhan atau mengambil anggota populasi.

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif karena data yang digunakan berasal dari sumber data yang sudah ada yaitu dari laporan keuangan. Sehingga peneliti langsung dapat mengujinya dengan menggunakan rasio keuangan.

Sedangkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua yaitu data sekunder merupakan data yang diperoleh dari laporan-laporan neraca dan rugi laba serta dokumen-dokumen yang erat hubungannya dengan objek yang sedang dibahas berupa PSAK 72 yang diterbitkan oleh IAI.

Dalam memperoleh data guna penelitian penulisan ini, maka perlu dilakukan proses pengumpulan data yang didalamnya terdiri dari informasi-informasi yang di terima oleh penulis baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, maka penulis

menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang relevan dengan menganalisis masalah, yaitu :

1. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen yang ada pada perusahaan, yang meliputi laporan keuangan perusahaan dan mempelajari Exposure Draft PSAK 72.
2. Riset Internet (Online Research), penulis berusaha untuk memperoleh berbagai data dan informasi tambahan yang berhubungan dengan penelitian dari situs-situs yang dapat dipercaya.

Metode analisis yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu teknik analisis deskriptif kuantitatif dan Melakukan perbandingan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah PSAK 72 diterapkan. Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini dan sebagai berikut:

1. Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72.
 - a. Langkah pertama yaitu, mengidentifikasi jenis-jenis kontrak dengan pelanggan pada PT. PLN (Persero) yang penulis dapatkan dari bagian laporan keuangan, yaitu Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
 - b. Langkah kedua yaitu, mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan kontrak dengan pelanggan pada PT. PLN (Persero) yang penulis dapatkan dari bagian laporan keuangan, yaitu Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
2. Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK 72.
 - a. Langkah ketiga yaitu, menentukan harga transaksi pendapatan dari kontrak pada PT. PLN (Persero) yang penulis dapatkan dari Laporan Keuangan PT. PLN (Persero) tahun 2020.
 - b. Langkah yang terakhir yaitu, pengukuran kinerja keuangan yang dihitung menggunakan rasio keuangan antara lain: rasio likuiditas dihitung menggunakan current ratio, rasio aktivitas dihitung menggunakan total asset turnover, rasio solvabilitas dihitung menggunakan debt ratio, rasio profitabilitas dihitung menggunakan return on equity, dan rasio pasar dihitung menggunakan price per earning.

1) Rasio lancar (current ratio/CR)

Rasio lancar (current ratio disingkat CR) adalah sebagai alat ukur untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang mengalami segera jatuh tempo terhadap aset lancar yang tersedia. Rumusnya ialah:

$$CR = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

2) Rasio *total assets turnover* (TAT)

Rasio *total assets turnover* (TAT) adalah kemampuan serta efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menunjang kegiatan penjualan. Rumusnya ialah:

$$TAT = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

3) Rasio hutang terhadap aset (*debt to assets ratio*/DER)

Rasio hutang terhadap aset (*debt to asset ratio*/DER) sebagai pengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset. Rumusnya ialah:

$$DR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

4) Rasio imbalan kepada pemegang saham (*Return On Equity*/ROE)

Rasio imbalan kepada pemegang saham (*Return On Equity* disingkat ROE) sebagai pengukur tingkat pengembalian ekuitas. Rumusnya ialah:

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Modal Saham}} \times 100\%$$

5) Rasio harga terhadap pendapatan (*Price to Earning Ratio*/PER)

Rasio harga terhadap pendapatan (*Price to Earning Ratio* disingkat PER) sebagai pengukur seberapa besar harga yang ingin dibayar oleh pasar terhadap pendapatan atau laba suatu perusahaan. Rumusnya ialah:

$$PER = \frac{\text{Harga Pasar per Lembar}}{\text{Earning per Lembar}}$$

Perhitungan kelima rasio dilaksanakan sesuai nilai pendapatan yang dihitung berdasarkan PSAK 72 setelah itu hasil diinterpretasikan dan dibuat kesimpulan dalam bentuk analisis dampak penerapan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan PT. PLN (Persero).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72

Perusahaan menerapkan PSAK No. 72 sejak 1 Januari 2020 yang membutuhkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
4. alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relative diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin;
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

PT. PLN (Persero) telah memilih untuk menerapkan PSAK 72 secara retrospektif hanya terhadap kontrak yang bukan merupakan kontrak selesai pada tanggal penerapan awal. Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Jenis-jenis kontrak dengan pelanggan pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah sebagai berikut: Penjualan tenaga listrik, Subsidi listrik Pemerintah, Pendapatan kompensasi, Biaya penyambungan pelanggan, Penjualan batubara, Pendapatan usaha lainnya

Perhitungan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72

Pembahasan pada bagian ini adalah mengenai perhitungan pendapatan berdasarkan PSAK 72. Transaksi penjualan yang dihitung adalah transaksi kontrak dengan pelanggan yang terjadi pada tahun 2020 pada PT. PLN (Persero). Ringkasan transaksi kontrak dengan pelanggan dan kewajiban pelaksanaan sesuai hasil analisis tahap pertama dan kedua pada PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Analisis Tahap Pertama dan Kedua Berdasarkan PSAK 72

Nama Perusahaan	Transaksi Kontrak dengan Pelanggan	Kewajiban Pelaksanaan
PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1. Penjualan Tenaga Listrik 2. Subsidi Listrik Pemerintah 3. Pendapatan kompensasi 4. Biaya penyambungan pelanggan 5. Penjualan batubara 6. Pendapatan usaha lainnya	Kewajiban Pelaksanaan atas penjualan tenaga listrik, subsidi listrik pemerintah, pendapatan kompensasi, penyambungan pelanggan, penjualan batubara, dan pendapatan lainnya

Sumber: Data diolah Penulis 2021

Dalam menghitung pendapatan, berdasarkan PSAK 72 paragraf 46 "Ketika (atau selama) kewajiban pelaksanaan diselesaikan, entitas mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi (yang tidak termasuk estimasi atas imbalan variabel yang dibatasi sesuai dengan paragraf 56-58) yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan."

Perusahaan wajib menetapkan harga transaksi dan melakukan alokasi harga transaksi tersebut terhadap tiap-tiap kewajiban pelaksanaan. Selanjutnya, berdasarkan paragraph 47 "Entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga (sebagai contoh, beberapa pajak penjualan). Imbalan yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dapat mencakup jumlah tetap, jumlah variabel, atau keduanya."

Harga transaksi ditetapkan dengan melakukan pertimbangan kriteria atau syarat kontrak dengan praktik bisnis pada umumnya. Harga transaksi yang dipakai adalah sesuai total nilai transaksi kontrak dengan pelanggan yang terjadi selama tahun 2020 yang ditampilkan dalam tabel analisis tahap ketiga sebagai berikut:

Tabel 3
Analisis Tahap Ketiga Berdasarkan PSAK 72

Nama Perusahaan	Jenis Transaksi Kontrak dengan Pelanggan	Jumlah Pendapatan Transaksi Kontrak dengan Pelanggan (dalam jutaan rupiah)
PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1 Penjualan Tenaga Listrik	Rp 274.898.464
	2 Penyambungan Pelanggan	Rp 312.725
	3 Subsidi Listrik Pemerintah	Rp 47.988.114
	4 Pendapatan Kompensasi	Rp 17.904.508
	5 Penjualan Batubara	Rp 1.461.342
	6 Pendapatan usaha lainnya	Rp 2.850.484
Total		Rp 345.415.637

Sumber: Data diolah Penulis 2021

Pengukuran Kinerja Keuangan

Pada bagian ini, dilakukan pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan berdasarkan nilai pendapatan yang sesuai dengan PSAK 72 pada PT. PLN (Persero) pada tahun 2020. Perhitungan rasio dilakukan untuk melihat dampak penerapan PSAK 72 pada kinerja keuangan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Menurut Djarwanto dalam (**Roman, 2014**), “Standar rasio yang baik adalah yang memberikan gambaran rata-rata. Gambaran rata-rata paling tepat adalah rasio industri”. Dengan adanya standar ini, perusahaan dapat menentukan apakah kinerja keuangannya baik atau tidak. Di bawah ini merupakan tabel menunjukkan rasio standar industri.

Tabel 4
Rasio Standar Industri

Rasio Laporan Keuangan	Standar Industri	Kriteria
Current Ratio (CR)	200% / 2 kali	>200% / 2 kali = Baik <200% / 2 kali = Tidak Baik
Rasio total assets turnover (TAT)	200% / 2 kali	>200% / 2 kali = Baik <200% / 2 kali = Tidak Baik
Rasio hutang terhadap aset (DER)	35%	>35% = Tidak Baik <35% = Baik
Return on equity (ROE)	40%	>40% = Baik <40% = Tidak Baik
Price to earning ratio (PER)	20-25 kali	>25 kali = Baik <20 kali = Tidak Baik

Sumber : Kasmir, 2017

Berikut adalah ringkasan laporan keuangan PT. PLN (Persero) Tahun 2020.

Tabel 5
Ringkasan Laporan Keuangan PT. PLN (Persero) Tahun 2020

No:	Pos Akun	Periode 2020 (dalam jutaan rupiah)
1.	Aktiva Lancar	Rp 97.153.318
2.	Utang Lancar	Rp 149.659.239
3.	Total Aktiva	Rp 1.589.059.781
4.	Total Utang	Rp 649.274.189
5.	Modal Saham	Rp 439.000.000
6.	Harga Pasar per Lembar	Rp 1.000.000
7.	Earning per Lembar	Rp 48.439
8.	Laba bersih	Rp 5.993.428
9.	Penjualan	Rp 276.359.806

Sumber: Data diolah penulis 2021

Data Keuangan yang digunakan berasal dari hasil perhitungan pendapatan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya dan laporan keuangan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada tahun 2020. Hasil perhitungan Rasio keuangan disajikan dalam table berikut.

Tabel 6
Hasil Perhitungan Rasio Keuangan

Rasio	Pos Akun (dalam jutaan rupiah)		Hasil Perhitungan Rasio Berdasarkan PSAK 72	Standar Industri
Current Ratio	Aktiva Lancar	Utang Lancar	64,92%	200% / 2 kali
	Rp.97.153.318	Rp.149.659.239		
Rasio total asset turnover (TAT)	Penjualan	Total Aktiva	17,39%	200% / 2 kali
	Rp.276.359.806	Rp.1.589.059.781		
Rasio hutang-aset (DER)	Total Utang	Total aset	40,86%	35%
	Rp.649.274.189	Rp.1.589.059.781		
Return on equity (ROE)	Laba bersih	Modal Saham	1,37%	40%
	Rp.5.993.428	Rp.439.000.000		
Price to earning ratio (PER)	Harga Pasar per Lembar	Earning per Lembar	2064,45%	20-25 kali
	Rp.1.000.000	Rp.48.439		

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan perhitungan yang disajikan dalam tabel 6 di atas, terlihat bahwa hasil perhitungan *current ratio* sebesar 64,92% dengan standar industri 200% / 2 kali, *total assets turnover* sebesar 17,39% dengan standar industri 200% / 2 kali, *debt to asset ratio* (DER) sebesar 40,86% dengan standar industri 35% dan *Return On Equity* sebesar 1,37% dengan standar industri 40% pada kinerja keuangan PT. PLN (Persero) pada tahun 2020 dinilai tidak baik setelah PSAK 72 diterapkan jika diuji menggunakan rasio standar industri oleh Kasmir (2017). Namun, untuk hasil perhitungan *price to earning ratio* (PER) sebesar 2064,45% dengan standar industri 20-25 kali pada kinerja keuangan PT. PLN (Persero) pada tahun 2020 dinilai baik setelah PSAK 72 diterapkan.

Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan kinerja keuangan PT. PLN (Persero) Tahun 2020 yang diuji menggunakan rasio standar industri oleh Kasmir (2017), maka hasil penelitian berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan PT. PLN (Persero) Tahun 2020 ketika PSAK 72 diterapkan. Hasil penelitian mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan pada industri telekomunikasi dan real estat bahwa penerapan PSAK 72 akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan.

KESIMPULAN

PT. PLN (Persero) telah memilih untuk menerapkan PSAK 72 secara retrospektif hanya terhadap kontrak yang bukan merupakan kontrak penyelesaian pada tanggal penerapan awal. Jenis-jenis kontrak dengan pelanggan pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah sebagai berikut: Penjualan tenaga listrik, Subsidi listrik Pemerintah, Pendapatan kompensasi, Biaya penyambungan pelanggan Penjualan batubara, Pendapatan usaha lainnya

Kinerja keuangan perusahaan PT. PLN (Persero) menunjukkan keadaan tidak baik saat penerapan PSAK 72 diterapkan, terlihat dengan hasil perhitungan bahwa *current ratio*, *total assets turnover* *debt to asset ratio*, dan *Return On Equity* pada kinerja keuangan PT. PLN (Persero) pada tahun 2020 dinilai tidak baik jika diuji menggunakan standar industri oleh Kasmir, 2017 setelah PSAK 72 diterapkan. Sebaliknya, untuk hasil perhitungan *price to earning ratio* (PER) pada kinerja keuangan PT. PLN (Persero) pada tahun 2020 dinilai baik menggunakan standar industri oleh Kasmir, 2017 setelah PSAK 72 diterapkan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya pada industri telekomunikasi dan real estat.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting Standard Resume PSAK 23, Tersedia pada <https://accountingunsoed.org/accounting-standard-resume-psak-23-bagian-1/>, (diakses pada 3 November 2021).
- Accounting Standard Resume ISAK 10, Tersedia pada <https://accountingunsoed.org/accounting-standar-resume-isak-10/>, (diakses pada 3 November 2021).
- Accounting Standar Resume PSAK 44, Tersedia pada <https://accountingunsoed.org/accounting-standar-resume-psak-44/>, (diakses pada 3 November 2021).
- Akuntansi Keuangan Interpretasi SAK 16 dan ISAK 21, Tersedia pada <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/interpretasi-sak-16-isak-21-perjanjian-konstruksi-real-estat>, (diakses pada 3 November 2021).
- Akuntansi Keuangan Interpretasi SAK 22 dan ISAK 27, Tersedia pada <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/interpretasi-sak-22-isak-27-pengalihan-aset-dari-pelanggan>, (diakses pada 3 November 2021).
- Almayda, P,L., Hendrik, M., dan Syermi, S,E,M., (2020), Analisis pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 pada PT Pos Indonesia (Persero) Manado, Vol.8 No.4 Oktober 2020, Hal. 1154-1161.
- Claristy Novenaliane Halim, (2020), Pengaruh Implementasi Pengakuan Pendapatan Psak 72 Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Real Estate Tahun 2018-2019).
- CNNIndonesia, Laba PLN Anjlok jadi Rp4,32 Triliun pada 2019, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200518203030-85-504672/laba-pln-anjlok-jadi-rp432-triliun-pada-2019> (diakses pada 28 Juni 2020).
- Duwi Rahayu, (2020), Analisis Dampak Penerapan Psak 72 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Telekomunikasi Di Masa Pandemi Covid-19, Vol. 2 No. 2 Desember 2020.
- Haifa Shabirah HS, (2019), Pengaruh PSAK 72 terhadap nilai perusahaan (Studi empiris pada perusahaan indeks LQ-45 Tahun 2018).
- Hayati, P., dan Amrie, F., (2020), Penerapan Psak 72 Terkait Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Vol. 4, No. 2, December 2020.
- IAI, “PSAK 72”, ini Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, (2017), tersedia pada <http://www.iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-83-psak-72-pendapatan-dari-kontrak-dengan-pelanggan#:~:text=PSAK%2072%20menetapkan%20prinsip%20yang,timbul%20dari%20kontrak%20dengan%20pelanggan>, (diakses pada 23 Mei 2021).

- Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat, Implikasi Pemberlakuan PSAK 72 Terhadap Pelaporan Keuangan, Sesi I, Fasilitator: Marisi P. Purba, S.E., M.H., Ak, CA, ACPA
- Ikatan Akuntansi Indonesia, Undangan Public Hearing Exposure Draft Amandemen PSAK 62, ED PSAK 72, ED ISAK 3, Detail Berita., tersedia pada <http://www.iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-963=undangan-public-hearing-exposure-draft-amandemen-psak-62-ed-psak-72-ed-isak-32>, (diakses pada 23 Mei 2021).
- Ila C., dan Annisa N., (2020), Analisis Dampak Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Psak 72 pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Volume 14 No 1, Februari 2020 : 220 – 240.
- Irham Fahmi, (2012), Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Ke-2, Bandung : Alfabeta.
- James C, Van Horne & John M, Wachowicz, JR, (2012), Prinsip – Prinsip Manajemen Keuangan, Edisi 12 buku 1, Salemba Empat : Jakarta.
- Jurnal entrepreneur, PANDUAN AKUNTANSI Jenis-Jenis Laporan Keuangan Dalam Akuntansi dan Cara Mudah Investor Melihat dan Menilai Perusahaan Melalui Laporan Keuangan, tersedia pada <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-jenis-jenis-laporan-keuangan-dalam-akuntansi/>, (diakses pada 24 Mei 2021).
- Kasmir, (2014), Analisis Laporan Keuangan, Edisi pertama cetakan-7, Rajawali Pers : Jakarta.
- Kasmir, (2015), Analisis Laporan Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir, (2017), Analisis Laporan Keuangan, PT Raja Grafindo Persada.
- Kompas.com, Akhdi Martin Pratama, PSAK Ditetapkan, CAR Bank BUMN Terimbas, tersedia pada <https://lifestyle.kompas.com/read/2019/05/09/221100526/psak-ditetapkan-car-bank-bumn-terimbas>, (diakses pada 24 Mei 2021), Erlangga Djumena.
- Kontan.co.id, Standar Akuntansi baru PSAK 71, 72, dan 73 berlaku 1 Januari 2020, ini perbedaannya., tersedia pada <https://investasi.kontan.co.id/news/standarisasi-akuntansi-baru-psak-71-72-dan-73-berlaku-2020-ini-perbedaannya>, (diakses pada 23 Mei 2021).
- Laporan Tahunan 2019 Annual Report, Memaknai tantangan, Meningkatkan Layanan, Diunduh melalui situs www.PLN.co.id (diakses pada 23 Mei 2020).
- Munawir, (2010), Analisis Laporan Keuangan, Edisi 4. Yogyakarta : Liberty.
- Niko Ramadhani, Pengertian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, tersedia pada <https://www.akseleran.co.id/blog/psak-adalah/> , (diakses pada 23 Mei 2021).

- PSAK No. 34 Mengenai Kontrak Kontruksi, Tersedia pada [https://dconsultingbusinessconsultant.com/psak-no-34-mengenai-kontrak-kontruksi/Psak 23](https://dconsultingbusinessconsultant.com/psak-no-34-mengenai-kontrak-kontruksi/Psak%2023), (diakses pada 3 November 2021).
- Santoso Imam, (2010), Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting), Buku 1, Refika Aditama : Bandung.
- Sila Ninin Wisnantiasari, (2018), Pengaruh PSAK 72: Pendapatan Kontrak dengan pelanggan terhadap Shareolder Value, Vol 5 No. 1 Maret 2018.
- Sofyan Syafri Harahap, (2011), Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, Jakarta : Raja grafindo Persada.
- Sofyan Syafri Harahap, (2015), Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Standar akuntansi baru PSAK 71, 72, dan 73 berlaku 2020, ini perbedaannya, tersedia pada <https://investasi.kontan.co.id/news/standarisasi-akuntansi-baru-psak-71-72-dan-73-berlaku-2020-ini-perbedaannya?page=all> (diakses pada 3 November 2021)
- Veronica., Utami, P,L.,dan Elisabeth, Y., (2019), Analisis Dampak Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Real Estat di Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018.